

**Faktor-Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah  
(Studi empiris pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten)**

Andri Zulfiandri  
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman – Provinsi Banten  
[ezzaro.12@gmail.com](mailto:ezzaro.12@gmail.com)

**A b s t r a c t**

*This study was to examine the budget goal clarity, competence of personnel, implementation of local financial accounting and quality control of financial statements to the accountability of the performance of government agencies. The population in this study were 44 OPD in the Government of Banten Province by sampling using purposive sampling with the number of respondents as many as 80 respondents. Data was analyzed using SmartPLS version 3.0 Professional. The results of this study stated that the budget goal clarity, competence of personnel, implementation of local financial accounting and financial reporting quality control affect the performance accountability of government agencies. Results of this research is also expected to provide input to OPD to further improve performance accountability of government agencies. For further research in order to add the variable management commitment, leadership style and organizational culture.*

**Keywords :** *Budget Targets Clarity, Competence of Administrative, Accounting Application Regions Financial, Financial Reports Quality Control, Accountability Government Performance*

**PENDAHULUAN**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan pengelolaan pemerintah daerah yang akuntabel, juga tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Pemerintah dalam usaha lingkup anggaran pun menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran.

Pada konteks pemerintah daerah, dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Properda). Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target- target anggaran. Sehingga setiap tahunnya tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebabkan oleh tidak

tercapainya program yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah salah satu tanggung jawab organisasi pemerintah daerah yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah, Gubernur / Bupati / Walikota adalah diperlukan untuk mengatur keuangan daerah yang harus dilaporkan nantinya kepada publik melalui DPR / DPRD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Isi dari LKPD itu sendiri yaitu, menyajikan informasi tentang jumlah realisasi belanja, pendapatan daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah dari pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya

mewujudkan pemerintahan yang baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tandai dengan hadirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru yaitu, PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai penyempurnaan SAP yang lama yaitu, PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengharuskan seluruh instansi pemerintah agar melaksanakannya selambat-lambatnya pada laporan keuangan di akhir tahun anggaran 2015.

Penelitian tentang Kejelasan Sasaran Anggaran telah dilakukan oleh Herawaty (2014) melalui studi empirisnya di Pemerintah Daerah Kota Jambi yang menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Anjarwati (2012) melalui studi empirisnya pada Pemerintah Daerah di 51 SKPD di wilayah Tegal dan Pemalang menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil ini berbeda dengan Darwanis dan Chairunnisa (2013) melalui

penelitiannya di Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian mengenai kompetensi aparatur telah dilakukan oleh Nofianti dan Seseno (2014) pada 57 SKPD se-Provinsi Riau menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Rofika dan Ardianto (2014) pada penelitian yang dilakukan melalui kuesioner kepada 62 responden yang mewakili SKPD di Kabupaten Kuantan Sengingi menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian tentang pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan di lakukan oleh Darwanis dan Chairunnisa (2013) melalui penelitiannya di Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Berbeda dengan hasil yang penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) melalui studi empirisnya pada Pemerintah Daerah di 51 SKPD di wilayah Tegal dan Pemalang bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh Darwanis dan Chairunnisa (2013) menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian yang tidak berbeda ditunjukkan juga oleh Ijeoma, N. B. (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) dapat memfasilitasi pengendalian internal atas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Santoso dan Pabelum (2008) meneliti tentang penerapan akuntansi sektor publik dan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Bastian,2013). Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandat yang diberikan oleh para stakeholder pemerintah daerah. Dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah dituangkan dalam APBD.

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau

langkah - langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan. National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang dikutip oleh Haruman (2013), Mengemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi interen yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja.
5. Anggaran merupakan alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrument politik.

7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979) Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

### **Kompetensi Aparatur**

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo,2008).

Moehariono (2009) mengungkapkan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan

dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

Aparatur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015, versi 1.4) aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pengertian perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan aparatur pemerintah daerah (yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efisien

dan efektif sesuai standar yang ditetapkan.

### **Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah**

Secara lebih terperinci Halim (2007) memaparkan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah.

Pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), investor, kreditur, donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya dan pemerintah

Salah satu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang akuntansi bagi sektor pemerintahan

adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

### **Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Dearah**

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Coryanata (2007) menyatakan bahwasanya pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Kamus Besar Akuntansi (2000) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Mardiasmo (2005) mendefinisikan akuntansi dan laporan keuangan sektor publik sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan daerah bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah daerah dapat memenuhi karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan. Namun hal yang lebih penting dari sebuah pengawasan adalah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang akan berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

LAN (2003) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

### **Kerangka Pemikiran**

Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2004) memberikan hasil yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Kenis (1979) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidaktepatan

sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal inilah nantinya yang akan menyebabkan kinerja karyawan menjadi menurun.

Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Guy et.al.,(2002), menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kompetensi adalah orang memiliki pengetahuan dan etika dalam bekerja (Cheng et.al; 2002). Afiah (2004) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hubungan antara kompetensi aparatur pemerintah daerah dan pemerintahan yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan sistem informasi, penganggaran akuntansi, dan kualitas

informasi keuangan secara simultan dan parsial mempengaruhi prinsip-prinsip good governance.

### **Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah**

Penelitian Yudianto (2005) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah akan dapat membantu untuk menjadikan laporan keuangan instansi pemerintah daerah menjadi lebih baik, dan hal ini akan memberikan dampak meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2006) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik merupakan alat yang efektif untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Sehingga nantinya akuntabilitas dan transparansi publik akan terwujud sebagai salah satu upaya untuk mencapai good governance.

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan Yudianto (2005) memaparkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena pengawasan yang telah dilakukan selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan kinerja merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengawasan juga akan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sehingga akan mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas.

### **Hipotesis**

Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, penulis memberikan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H2 : Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H3 : Penerapan Akuntansi Keuangan

Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H4 : Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang berjumlah 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### **Sampel Penelitian**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada (Sugiyono, 2011). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non probability sampling (purposive sampling). Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014).

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yang diajukan sebagai berikut : (1) Pejabat yang memiliki kapasitas dalam menggunakan, mengawasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran, (2) Pejabat yang menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan keuangan.

#### **Tehnik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan memakai kuesioner sebagai alat pengumpul data dalam lingkungan

yang sebenarnya (Sekaran, 2003). Pendistribusian kuesioner diberikan ke masing – masing Pengguna Anggaran dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Keuangan pada masing-masing OPD di Pemerintah Provinsi Banten.

#### **Teknis Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode SEM (structure equation model) berbasis PLS (partial least square) yang memerlukan 2 (dua) tahap pengujian untuk menilai model dari sebuah model penelitian.

#### **Evaluasi Model**

Menurut (Widarjono, 2015) analisis jalur di dalam PLS SEM menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikator didalam outer model. Evaluasi PLS SEM berbeda dengan CB SEM. Dalam PLS SEM tidak ada kelayakan model berdasarkan overall goodness of fit seperti CB SEM, karena PLS SEM bertujuan untuk meminimalkan perbedaan antara nilai prediktif dan aktual dari variabel dependen. Ada dua evaluasi model PLS SEM yaitu

evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

### **Evaluasi Outer Model atau Measurement Model**

Pengujian ini digunakan untuk memvalidasi model penelitian yang dibangun yang meliputi validasi konstruk (convergent validity dan discriminant validity) dan pengujian konsistensi internal (composite reliability). Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score yang dihitung dengan PLS.

### **Evaluasi Inner Model**

Terdapat dua tahap dalam pengujian ini, yaitu :

a) Signifikansi dan besarnya pengaruh variabel laten independen;

Pengujian signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel laten independen memengaruhi variabel laten dependen, uji dilakukan dengan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel laten

independen dengan uji t nilai signifikansi alpha ( $\alpha$ ) ditetapkan sebesar 5% (0,05) dan nilai t-tabel sebesar  $\pm 1,96$  dengan uji hipotesis dua sisi, karena pengaruhnya bisa positif dan negatif.

Kaidah keputusan jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (t-hitung  $>$  t-tabel), maka variabel laten dikatakan signifikan dan menerima hipotesis, dan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (t-hitung  $<$  t-tabel), maka variabel laten dikatakan tidak signifikan dan menolak hipotesis, selanjutnya dengan melihat koefisien analisis jalurnya (path coefficient). Signifikansi dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai alpha ( $\alpha$ ) dibandingkan dengan probabilitas statistik t yang nilainya disebut juga nilai p-value, jika nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha$ ), ( $p < \alpha$ ) berarti secara statistik variabel laten independen signifikan mempengaruhi variabel laten dependen, jika nilai p-value lebih besar dari nilai alpha ( $\alpha$ ), ( $p > \alpha$ ) berarti secara statistik variabel laten independen tidak signifikan mempengaruhi variabel laten dependen.

b) **Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**;  
 Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi variabel laten dependendijelaskan oleh variabel laten independen.Uji R<sup>2</sup> atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur

seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Seluruh data yang di peroleh peneliti untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Struktural Equation Model (SEM) dalam Software SmartPLS (partial least square) versi 3.0 Profesional

**Statistik Deskriptif**

Tabel 4.6

Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Median	Modus	Stand. Dev
<b>KSA</b>	80	2	5	4,21	4	4	0,699
<b>KAP</b>	80	2	5	4,21	4	4	0,695
<b>AKD</b>	80	2	5	4,22	4	4	0,664
<b>KLK</b>	80	2	5	4,25	4	4	0,687
<b>AKIP</b>	80	2	5	4,23	4	4	0,691

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Tabel 4.6 menunjukkan nilai terendah, nilai tertinggi, mean, median, modus dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui gambaran tentang distribusi data sebagai berikut :

1) Kejelasan Sasaran Anggaran. Untuk variabel KSA nilai Min adalah 2, Max adalah 5, Mean adalah 4,21 dan standard deviation atau nilai penyebaran kuesioner adalah 0,699. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata score KSA tinggi, mayoritas responden lebih memilih skor 4 dari lima komponen nilai yang ada. Ini membuktikan bahwa sebagian besar responden setuju dan mendukung adanya perbaikan pada penyusunan dan penetapan anggaran agar lebih komprehensif, efisien, partisipatif dan tepat sasaran sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi lebih mudah tercapai.

2) Kompetensi Aparatur. Variabel KPA memiliki nilai Min adalah 2, Max adalah 5, Mean adalah 4,21 dan standard deviation atau nilai penyebaran kuesioner adalah 0,695. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata skor kompetensi aparatur tinggi, mayoritas responden lebih

memilih skor 4 dari lima komponen nilai yang ada. Ini membuktikan bahwa sebagian besar responden setuju dan mendukung adanya peningkatan kualitas aparatur, terutama pada pelaksana akuntansi pada setiap OPD harus memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma akuntansi. Pemahaman terhadap akuntansi akan lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan OPD yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat meningkat dari yang sebelumnya.

3) Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah. Variabel AKD memiliki nilai Min adalah 2. Max adalah 5, Mean adalah 4,22 dan standard deviation atau nilai penyebaran kuesioner adalah 0,664. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata skor Akuntansi Keuangan Daerah tinggi, mayoritas responden lebih memilih skor 4 dari lima komponen nilai yang ada. Ini membuktikan bahwa sebagian besar responden setuju dan mendukung dalam penerapan akuntansi berbasis

akrual yang tercantum dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010.

4) Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan. Variabel KLK memiliki nilai Min adalah 2, Max adalah 5, Mean adalah 4,25 dan standard deviation atau nilai penyebaran kuesioner adalah 0,687. Menunjukkan bahwa secara rata-rata skor pengawasan kualitas laporan keuangan tinggi, mayoritas responden lebih memilih skor 4 dari lima komponen nilai yang ada. Ini membuktikan bahwa sebagian besar responden setuju dan mendukung dalam peningkatan pengawasan kualitas laporan keuangan daerah karena saat ini Pemerintah Provinsi Banten baru hanya mampu meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari hasil audit BPK RI.

5) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada variabel AKIP memiliki nilai Min adalah 2, Max

adalah 5, Mean adalah 4,23. standard deviation atau nilai penyebaran kuesioner adalah 0,691. Menunjukkan bahwa secara rata-rata skor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tinggi, mayoritas responden lebih memilih skor 4 dari lima komponen nilai yang ada. Ini membuktikan bahwa sebagian besar responden setuju dan mendukung dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas, bahwa dengan adanya peningkatan terhadap kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur, penerapan akuntansi keuangan daerah dan pengawasan kualitas kinerja instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar lebih baik lagi.

## Pengujian Kualitas Data

### Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software SmartPLS dengan Outer Model, yaitu Convergent validity yang dilihat dengan nilai square root of average variance extracted (AVE) masing-masing konstruk dimana nilainya harus lebih besar dari 0,5 (Chin dalam Ghazali, 2012). Cara lain yaitu dengan membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk (variabel laten) dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Apabila nilai akar kuadrat dari AVE untuk setiap

konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2012) atau dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik.

Nilai dari average extracted (AVE) dan akar dari konstruk kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur, penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan secara ringkas dalam Tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7

#### *Average Variance Extracted (AVE)*

	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>	$\sqrt{\text{AVE}}$	<b>Keterangan</b>
KSA	0,715	0,845	Valid
KAP	0,762	0,872	Valid
AKD	0,739	0,859	Valid
KLK	0,781	0,883	Valid
AKIP	0,771	0,878	Valid

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2017



Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai AVE dan akar AVE dari konstruk kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur, penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masing-masing konstruk (variabel) memiliki nilai  $AVE > 0,5$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai validitas yang baik dari setiap indikatornya atau kuesioner yang digunakan untuk mengetahui hubungan kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur, penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan

kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Uji Reliabilitas

Sebuah kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden menghasilkan jawaban yang sama dari waktu ke waktu atau stabil. Suatu data dapat dikatakan reliabel jika *composite reliability* lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2012). Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan *software SmartPLS* dengan kriteria uji *composite reliability* dijelaskan dalam Tabel 4.9 berikut

**Tabel 4.9**  
**Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>	<b>Keterangan</b>
<b>KSA</b>	0,968	Reliabel
<b>KAP</b>	0,962	Reliabel
<b>AKD</b>	0,962	Reliabel
<b>KLK</b>	0,914	Reliabel
<b>AKIP</b>	0,953	Reliabel

Sumber : Data primer diolah dengan *SmartPLS*, 2017

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat setiap konstruk atau variabel laten tersebut memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 yang menunjukkan bahwa *internal consistency* dari variabel konstruk kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur, penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki reliabilitas yang baik. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap jawaban yang di lakukan oleh responden terhadap kuesioner menghasilkan jawaban yang konsisten dari waktu ke waktu.

### **Pembahasan Hipotesis**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Kejelasan sasaran anggaran (KSA) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Berdasarkan data yang telah diolah, hasil perhitungan yang di peroleh adalah nilai *original sample estimate* sebesar 0,250 dan nilai t-statistik sebesar 2.320 atau > 1.96.
- 2) Kompetensi aparatur (KAP) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Berdasarkan data yang telah diolah, hasil perhitungan yang di peroleh adalah nilai *original sample estimate* sebesar 0,347 dan nilai t-statistik sebesar 3.163 atau > 1.96.
- 3) Penerapan akuntansi keuangan daerah (AKD) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Berdasarkan data yang telah diolah, hasil perhitungan yang di peroleh adalah nilai *original sample estimate* sebesar 0,182 dan nilai t-statistik sebesar 2.257 atau > 1.96.
- 4) Pengawasan kualitas laporan keuangan (KLK) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Berdasarkan data yang telah diolah, hasil perhitungan yang di peroleh adalah nilai *original sample estimate* sebesar 0,231 dan nilai t-statistik sebesar 4.282 atau > 1.96.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Saran**

- 1) Penyusunan anggaran diharapkan agar dibuat secara lebih jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya pada masing-masing OPD di Pemerintah Provinsi Banten.

- 2) Penyajian laporan keuangan OPD diharapkan sudah sesuai dengan SAP dan tepat waktu. Masih kurangnya pengawasan dari pimpinan, seringkali laporan keuangan OPD terlambat sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 3) Menambahkan variabel lainnya seperti gaya kepemimpinan, komitmen pimpinan dan budaya organisasi dimana dari variabel tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 4) Menambah responden dalam penelitian ini agar hasil penelitian lebih berkembang dari penelitian sebelumnya.

### **Keterbatasan**

- 1) Penelitian ini hanya berdasarkan pada persepsi responden, sehingga jawaban responden bisa berubah pada waktu yang berbeda. Karenanya perlu kehati-hatian untuk generalisasi hasil penelitian.
- 2) Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data hanya berupa kuesioner.

Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner sehingga akan menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, apalagi jika kuesioner tersebut bukan diisi oleh responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Keadaan seperti ini merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan dan diluar batas kemampuan peneliti.

- 3) Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini hanya 80 dari 88 kuesioner, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan kesibukan responden itu sendiri.

Hasil penelitian tidak bisa di generalisir untuk setiap OPD atau Instansi lainnya

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Karim, (2014), Performance Accountability of Government Institution (Study in Education Agency in East Kalimantan Province), *Public Policy and Administration Research* [www.iiste.org](http://www.iiste.org) ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972 (Online) Vol.4, No.6, 2014
- Andi Basru, W (2013). The Influence of Internal and External Monitoring Leadership Style and Good Public Governance Implementation on Financial Reporting Performance. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, ISSN. 2090-4304, [www.textroad.com](http://www.textroad.com)
- Boutler. Nick., Murray,D., & Jackie, H. (1999). *People and Competency, the Route to Competitive Advantage*. Crest Publishing House. New Delhi.
- Cheng,R.H., John H.E., Susan, C. Kattelus, Fall.(2002). Educating government Financial Managers: University collaboration between business and public administration, *The Journal of Government Financial Management*, Alexandria: Vol. 51, Iss.3, page 10, 5 pages. <http://gateway.proquest.com>.

- Cornforth, C. J., & Edwards, C. (1998). *“Good Governance: developing effective board-management relations in public and voluntary organizations”*. CIMA Publishing, London, UK. <http://gateway.brint.com>.
- Darwanis (2013). Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 2 Juli 2013
- Enceng, Liestyodono.B.I & Purwaningdyah. M.W. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Volume 2 No.1 Juni 2008, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, Jakarta
- Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. *Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi*, Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Hood, C. & Lodge, M. (2004). Competency, Bureaucracy, and Public Management Reform: A Comparative Analysis, *Governance*. <http://gateway.brint.com>.
- Ijeoma, N. B. (2014). The Impact Of International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) On Reliability, Credibility And Integrity Of Financial Reporting In State Government Administration In Nigeria. *International Journal of Technology Enhancements And Emerging Engneering Research*, Vol. 2, Issue 3, ISSN.2347-4289
- Kalbers, L. P., & Fogarty, T. J. (1995). Professionalism and It's Consequences: A Study of Internal Auditors. *A Journal of Practice and Theory*. Spring. Vol. 14. No.1.pp. 64-85 <http://gateway.proquest.com>.
- Kurtz, M. J., & Schrank, A. (2007). Growth and Governance: Models, Measures, and

- Mechanisms, *The Journal of Politics*, Vol. 69, No. 2, May 2007, pp. 538–554. , <http://gateway.brint.com>.
- Leny, N (2013). Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications Toward Performance Accountability. *International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014*, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
- Leung, P. (2009). The Role of Internal Audit in Corporate Governance and Management. *The Institute of Internal Auditors Inc. Research Foundation*, <http://gateway.brint.com>.
- Mei Anjarwati (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Accounting Analysis Journal*, AAJ 1 (2) (2012), ISSN: 2252-6765
- Netty Herawaty (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi, *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, Vol. 6 No.2 September 2014, ISSN: 1979-4851
- Nur Afiah, N (2004). Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- PERC. (2010). *PERC The Annual Graft Ranking Survey*. [www.perc.com](http://www.perc.com). Sarilena, D. (2004). Pengaruh Profesionalitas Aparat Badan Pengawasan Daerah Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*. Bandung,

- Disertasi. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Rofika, Ardianto (2014), Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No.2, April 2014 : 197-209, ISSN:2337-4314
- Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, Vol. 50, No. 1: 17-28.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Suwit Srimai (2015), Performance agreement in Thai public sectors A call for reconsideration at the provincial level, *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 64 Iss 5 pp. 625 – 639
- The Institute of Internal Auditors (2006). *The Role of Auditing in Public Sector Governance, Professional Guidance Setting the Standard*, <http://brint.com>.
- The World Bank Report (1999 – 2000). *Decentralization Rethinking Government*.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press.
- Transparency International Indonesia. (2010). Indeks persepsi korupsi tahun 2010 Di 50 kabupaten / kota di Indonesia. [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id). Utusan Riau. (2011). [Issuu.com/prasena/docs/haluanriau31okt2011](http://Issuu.com/prasena/docs/haluanriau31okt2011).

- Ummu Kaltsum, Abdul Rohman (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.4 No.2 2013, ISSN (Online): 2337-3806
- Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No.1: Hal. 14-33, ISSN. 0216-1249
- [www.banten.bpk.go.id](http://www.banten.bpk.go.id), 04 November 2016
- [www://pusdiklatwas.bpkp.go.id](http://pusdiklatwas.bpkp.go.id), 16 Desember 2016
- <http://www.menpan.go.id>, 27 Desember 2016
- Urip Santoso (2008). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah
- <http://www.slideshare.net/nanipalawa/akip-lakip-dan-sakip>, 04 Januari